

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2017 muncul isu *fraud* akuntansi di British Telecom. Sebagaimana skandal akuntansi lainnya, kasus *fraud* tersebut berdampak negatif kepada akutan publiknya. *Price Waterhouse Coopers* (PwC) merupakan kantor akuntan publik di dunia dan termasuk dalam *the bigfour* juga terkena dampak dalam isu *fraud* yang terjadi. Modus yang terjadi dalam *fraud* yaitu membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak palsu dan *invoice*-nya serta transaksi palsu pada vendor.

Dampak lain *fraud* akuntansi penggelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP 530 juta dan mendorong proyeksi arus kas sebesar GBP 500 juta untuk membayar hutang yang tidak dilaporkan. British Telecom telah rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang tidak sebenarnya. Skandal akuntansi ini juga menyebabkan kerugian pada pemegang saham dan investor dimana harga saham British Telecom anjlok ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatan sebesar GBP 530 juta di bulan Januari. *Fraud* atau kecurangan tidak hanya terjadi di perusahaan kecil saja, melainkan banyak terjadi di perusahaan besar yang maju korporasi ternama dan negara berkembang. Ini artinya *fraud* dianggap sebagai ancaman atau risiko yang terdapat di setiap organisasi.

Indonesia salah satu negara ASEAN yang menarik banyak pelaku usaha asing untuk membangun usahanya dikarenakan potensi pasarnya lebih besar.

Negara lain contohnya Malaysia merupakan negara yang memiliki perekonomian yang baik di bidang industri.

Pada era ekonomi global saat ini terjadi persaingan bisnis yang cukup ketat, banyak perusahaan dihadapkan pada kondisi yang lebih transparan dalam pengungkapan informasi laporan keuangan yang terdapat di perusahaan, terlebih pada perusahaan *go public* di pasar modal. Dengan menerapkan sistem *go public* perusahaan bisa memperbaiki citra dengan mengedepankan tata kelola perusahaan dengan sistem transparan atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Good Corporate Governance suatu struktur yang mengatur pola hubungan humoris tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan *stakeholder*. GCG merupakan suatu sistem pengecekan dan pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. GCG sendiri dengan memberikan perhatian terhadap peran manajemen risiko. Risiko merupakan bagian yang melekat dari kegiatan bisnis. Risiko dari segi finansial muncul karena adanya pergerakan pasar finansial yang tidak bisa diprediksi. Di tengah situasi ketidakpastian dalam persaingan bisnis maka penerapan manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk mengurangi dan mengatasi setiap risiko yang akan ataupun yang sudah terjadi di dalam perusahaan. Berdasarkan pengertian diatas hal ini pun sesuai dengan petunjuk Allah SWT, yang dinyatakan dalam Q.S An-Nisaa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS: An-nisa {4}: 58).

Penyampaian amanat pun menjadi lebih mudah dengan media yang sudah dipertanggungjawabkan perusahaan untuk menyampaikan informasi laporan keuangan kepada *stakeholder*. Adapun manajemen risiko perusahaan dinilai sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi. Terlebih lagi dengan perusahaan *go public*, pengungkapan manajemen risiko sangat penting dikarenakan *stakeholder* cukup beragam. Setelah diketahui manajemen risiko, selanjutnya harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi data atau informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Risiko juga berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan, sistem manajemen risiko yang baik merupakan suatu kekuatan bagi perusahaan dalam membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Ardiansyah dan Adnan, 2014). Pengungkapan informasi yang

transparan tersebut membuat beberapa pihak yang berkepentingan contohnya investor, kreditor, maupun pengguna informasi lainnya dapat terbantu dapat pengambilan keputusan dan kesiapan dalam menghadapi era perekonomian yang semakin berkembang saat ini. Salah satu pemegang saham dalam sebuah perusahaan yaitu publik atau masyarakat pada umumnya yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap perusahaan.

Struktur kepemilikan publik yaitu suatu perusahaan yang menyediakan pengungkapan informasi yang memadai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas (Fathimiyah, dkk 2012). Hal tersebut disebabkan oleh semakin besar saham yang dimiliki masyarakat maka pihak yang membutuhkan transparansi mengenai laporan keuangan semakin banyak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap investor perusahaan akan dituntut untuk memberikan laporan informasi secara terbuka dan secara transparan. Oleh sebab itu laporan keuangan yang dikelola sendiri menjadikan banyak batasan dan tidak bisa dimanipulasi (Kanhai dan L, 2014).

Perkembangan teknologi di ASEAN saat ini mengalami persaingan bisnis di berbagai perusahaan. Dengan adanya persaingan bisnis yang sangat ketat ini, membuat setiap perusahaan berlomba-lomba untuk memberi nilai tambah kepada *stakeholder*, hal ini suatu pencapaian perusahaan. Dengan pencapaian tersebut perusahaan akan dihadapkan dengan ketidakpastian.

Ketidakpastian adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam dunia bisnis. Kegiatan investasi juga merupakan kegiatan di dalam bisnis yang membutuhkan informasi yang relevan dan satu kegiatan bisnis yang

mengandung risiko dan ketidakpastian. Situasi ketidakpastian lingkungan dan persaingan kompetitif, perusahaan menghadapi berbagai risiko dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja mereka sendiri. Untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh risiko, perusahaan harus dikelola dengan baik dan bijak dalam menggunakan manajemen risiko. Kegagalan dalam manajemen risiko akan menyebabkan kerugian dalam perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung, sebagai konsekuensi dari kegiatan bisnis yang menimbulkan risiko (Halim, *et. all*, 2017).

Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) salah satu cara perusahaan *go publik* yang dapat membantu publik untuk percaya pada keakuratan pelaporan keuangan dan meminimalisir pihak yang tidak bertanggungjawab dalam penyalahgunaan laporan keuangan (Handayani dan Yanto, 2013). Pada dasarnya ERM menuntut adanya sistem transparan dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan yang mengacu pada manajemen risiko. Selain itu pengungkapan ERM sudah diterapkan sebagian di negara Asia Tenggara. Contoh dari beberapa negara yang sudah menerapkan ERM dalam mengelola risiko adalah Indonesia dan Malaysia. Keduanya merupakan sebagian dari beberapa negara yang merupakan bagian dari ASEAN. Dengan menerapkan ERM dengan baik, maka manajemen risiko dapat membuat langkah untuk kesuksesan di masa depan perusahaannya. Oleh karena itu mekanisme *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari tingkat transparansi dalam menyampaikan segala bentuk laporan. Laporan untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Perkembangan ERM, khususnya di negara Indonesia dan Malaysia sudah mulai berjalan dan berkembang dengan baik. Sebagian contoh perkembangan ERM di Indonesia pada tahun 2016, PT Pertamina EP sebagai anak buah dari PT. Pertamina (Persero) dan kontraktor kontrak kerja sama di bawah naungan SKKMigas menjuarai ajang *Asean Risk Management 2016* yang diikuti oleh 23 perusahaan di kawasan ASEAN. Ajang *Asean Risk Management 2016* yang diadakan oleh *Enterprise Risk Management Academy* melakukan penilaian kepada perusahaan di wilayah ASEAN terkait bagaimana pengelolaan faktor risiko di dalam perusahaan.

Selain itu di Indonesia, setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No8/4/PBI/2006 yang membahas tentang penerapan GCG bagi Bank Umum dengan pembentukan Komite Pemantauan Risiko. Pembentukan Komite Pemantauan Risiko merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh bank umum. Bagi bank yang belum membentuk komite pemantauan risiko akan dihadapkan dengan sanksi dari Bank Indonesia. *The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission (COSO)* mulai memperkenalkan ERM dan dipublikasi sejak tahun 2004. COSO mengemukakan bahwa ERM mampu memberikan konsep dan prinsip utama, pedoman dan arahan yang jelas. Bahkan lebih lanjut diharapkan mampu diterima secara meluas oleh berbagai perusahaan dan organisasi lainnya, *stakeholder* dan berbagai pihak yang berkepentingan. ERM juga sudah berkembang secara baik di berbagai negara di ASEAN, selain Indonesia

negara Malaysia sudah menerapkan sistem ERM dalam sistem operasional di dalam perusahaannya.

Dari fenomena yang terjadi tentang luas pengungkapan ERM yang masih beragam hasilnya, peneliti akan meneliti ulang dengan mereplikasi dari penelitian (Wulandari, 2018) perbedaan pada periode penelitian yaitu 2015-2017 dan penambahan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdapat di negara Indonesia dan Malaysia. Alasan saya memilih negara Malaysia sebagai perbandingan dikarenakan negara Malaysia termasuk negara yang tergabung dalam ASEAN. Adapula alasan memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain, dan perusahaan manufaktur mempunyai sektor industri yang beragam sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberikan judul “PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTURE KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT* (ERM)”

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang struktur *corporate governance* guna mendapatkan pengaruh terhadap luas pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Struktur *corporate governance* hanya dibatasi komisaris

independen, jumlah anggota dewan komisaris, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini mencoba menguji bagaimana pengaruh komisaris independen, ukuran dewan komisaris, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan publik terhadap *Enterprise Risk Management*. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia dan Malaysia.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komisaris independen terhadap luas pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh reputasi auditor terhadap luas pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia dan Malaysia.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia dan Malaysia.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap luas pengungkapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia dan Malaysia.

E. Manfaat penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat dibidang teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate governance* dan struktur kepemilikan publik terhadap luas pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

2. Manfaat dibidang praktis

Bagi perusahaan penerapan ERM dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi ke depan, membantu manajer perusahaan mengetahui segala macam strategi dalam menangani masalah yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di perusahaannya.

